

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Zulkarnain, Sirajuddin, and Aan Eko Widiarto. "Menggagas Keterbukaan Informasi Publik Upaya Kolektif Berantas Korupsi." *Malang: In Trans Publishing* .2006.

Keller, Kotlerdan; KOTLER, Philip. Manajemen Pemasaran edisi 12 jilid 1. *Jakarta: PT. Indeks*, 2007.

Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. 2012.

Butarbutar, Russel. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi*. Gramata Publishing, 2015.

Arsana, I. Putu Jati. Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Deepublish, 2016.

Nurhanrjanti, Nashirotun Nisa. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2017.

Simamora, Y. Sogar, et al. *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Airlangga University Press, 2021. Van Welee, Arjan. Purchasing and supply chain management. UK. Cengage Learning EMEA, 2018.

Utojo, Hertin Indira. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. Deepublish, 2019.

Nasution, L.. Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. ADALAH, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

JURNAL

Schooner, Christopher&. Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Public
Procurement Market. *Journal of GW Law Faculty Publication & Other
Works*, (2007).

Nurharjanti, Nashirotun Nisa. "Faktor-Faktor yang berhubungan dengan fraud pengadaan
barang/jasa di lembaga publik." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 18.2 (2017).

Ansari, Muhammad Insa. "Penerapan Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih." *Kanun Jurnal Ilmu
Hukum* 18.3.(2016).

Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of
Public Service)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.2.(2016).

Sronoto, Faradilla. Kewenangan Institusi Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan
Barang Dan Jasa Secara Elektronik. *Gorontalo Law Review*, 2020, 3.2: 226-
250.

Bareta, Rizky Dian, Budi Ispriyarso, and Kartika Widya Utama. "Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Belanja Online (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Keuangan Negara)." *Law Reform* 14.1 (2018): 29-41.